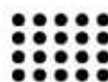




**BAPELITBANGDA KAB. TTU**



# 2024

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP



<https://bapelitbangda.ttukab.go.id/>



JL. EL TARI JUR-KUPANG



Ttukab.bapelitbangda@gmail.com



## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat & rahmat- Nya sehingga Laporan Kinerja tahun 2024 Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan kinerja ini adalah dalam rangka melaksanakan instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang menyebutkan bahwa setiap pemimpin departemen / lembaga pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja , unit kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.

Dalam Laporan Kinerja ini disajikan secara sistematis berdasarkan kondisi obyektif hasil – hasil yang dicapai oleh Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dengan menggunakan tolak ukur perjanjian kinerja.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Bapelitbangda pada Tahun berikutnya, sehingga penyusunan laporan yang akan datang akan lebih baik lagi. Harapan kami semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Kefamenanu, 26 Februari 2025  
KEPALA BAPELITBANGDA KAB. TTU,



**SALVATORE G.A.M. LAKE, SE**  
NIP. 19720818 200003 1009

# DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	iv
<b>BAB I        PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi dan Tata Laksana	2
1.3. Isu – isu Strategis Perangkat Daerah	3
1.4. Landasan Hukum	4
1.5. Sistematika	5
<b>BAB II       PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>6</b>
2.1. Rencana Strategis	6
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024	13
2.3. Perjanjian Kinerja 2024	13
<b>BAB III      AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>17</b>
3.1. Capaian Kinerja Bapelitbangda	17
3.2. Realisasi Anggaran	52
<b>BAB IV       PENUTUP</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan Umum Capaian Kinerja Bapelitbangda Kab. TTU	57
4.2 Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	58



## DAFTAR TABEL

		<b>Hal</b>
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	8
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Timor Tengah Utara	10
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Timor Tengah Utara	13
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kabupaten TTU Tahun 2024	14
Tabel 2.5	Rincian Pelaksanaan anggaran Bapelitbangda Tahun 2024	14
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kabupaten TTU Tahun 2024	15
Tabel 2.7	Rincian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bapelitbangda Tahun 2024	16
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024	18
Tabel 3.2	Capaian Persentase Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	19
Tabel 3.3	Capaian Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	19
Tabel 3.4	Data Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	20
Tabel 3.5	Capaian Persentase Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	23
Tabel 3.6	Data Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024	24
Tabel 3.7	Capaian Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan	26
Tabel 3.8	Capaian Nilai SAKIP Bapelitbangda	27
Tabel 3.9	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	28
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022	29
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026	31
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain	33
Tabel 3.13	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang telah dan akan dilakukan	35
Tabel 3.14	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan & Sasaran	42
Tabel 3.15	Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan	43
Tabel 3.16	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	53

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	3
-------------------------------------	---

# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan tuntutan masyarakat, mengharuskan pemerintah menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan suatu sistem yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan pihak yang diwajibkan menyampaikan LKjIP adalah Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan LKjIP yang merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuai dengan target yang telah diperjanjikan oleh masing-masing pejabat struktural. Melalui laporan ini akan tergambar hal-hal yang sudah tercapai dan belum tercapai serta strategi yang harus dilakukan agar capaian kinerja dapat dimaksimalkan sampai akhir Periode Renstra.

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan unsur penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah, Unsur penunjang Penelitian Daerah yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dan menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi di Daerah. Selain itu pula Bapelitbangda dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



Penyusunan Kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah



Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.



Pembinaan teknis Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

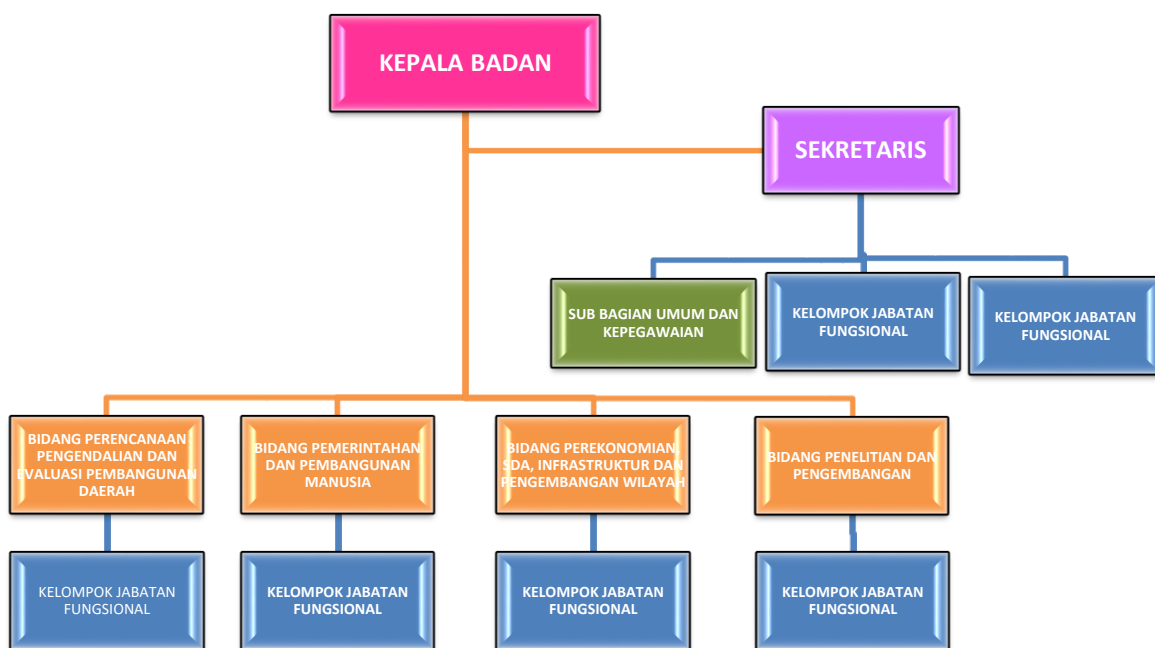


Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

:

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan Tata Kerja yaitu Kepala Badan sebagai Pimpinan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian. Berikut bagan Struktur Organisasi Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2022.

Gambar.1.1  
Struktur Organisasi  
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Timor Tengah Utara



### 1.3. ISU – ISU STRATEGIS

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bapelitbangda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Perencanaan, Penelitian dan



Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) dengan Perangkat lain serta masih kurangnya komitmen OPD yang sering kali menyebabkan belum konsistennya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data-data statistik pembangunan yang akurat;
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

#### **1.4. LANDASAN HUKUM**

Laporan Kinerja Bapelitbangda ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Timor tengah Utara Tahun 2024;

### **1.5. SISTEMATIKA**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV          PENUTUP**

## **BAB. II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 100 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dimuat program dan kegiatan

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Adapun masing-masing komponen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, adapun Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021- 2026 adalah :

**“ Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera adil  
Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya  
Manusia dan Sumber Daya Alam “**

#### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan;
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat;
- Misi 3 : Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur;
- Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif,.
- Misi 5 : Pengembangan kawasan strategis daerah.

Berdasarkan Rumusan Misi diatas maka Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya mengemban Misi Ke-4 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif dengan rumusan Sasaran beserta indikator untuk mencapai Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja  
Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator IKU	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			IKU	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Persentase Hasil Penelitian dalam Perencanaan Pembangunan	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai SAKIP	50.22	56.00	62.00	68	74	80	80
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) pada Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	78.73 ( B)	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15	82.15
		Optimalisasi Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1.8	1.9	2	2.2	2.4	2.7	2.7
		Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas pada Bapelitbangda	Nilai Evaluasi Internal Zona Integritas		WBK	WBK	WBBM	WBBM	WBBM	WBBM

Sumber : Renstra Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2021-2026

### 3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan IKU Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan Daerah No.5/Kep/Bapelitbangda/IV/2022 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Strategis Bapelitbangda yang tertuang dalam Renstra Bapelitbangda periode 2021-2026 namun berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan



oleh Kementrian PAN & RB terdapat beberapa catatan yang harus menjadi perhatian terkait kualitas IKU Bapelitbangda dimana terdapat beberapa sasaran kinerja yang perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan core business dan tidak berorientasi hasil sehingga Bapelitbangda telah menindaklanjuti hasil evaluasi dimaksud dengan melakukan perbaikan IKU tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Hasil Evaluasi AKIP Komponen Perencanaan	Nilai Sakip Komponen Perencanaan merupakan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB Khususnya terhadap Komponen Perencanaan Kinerja.	Surat / Lap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Oleh Kementerian PAN & RB
		Persentase Program RKPD Selaras Dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RPJMD yang dilaksanakan}}{\sum \text{Program yang ada dalam RPJMD}} \times 100$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD diperoleh dari Jumlah Program dalam RPJMD yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tercantum dalam RKPD / Renja PD tahun berkenan</li> <li>• Kesesuaian / keselarasan pelaksanaan program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah diukur dengan menganalisis aspek sasaran program dan indikator program antara Dokumen RPJMD dan RKPD</li> </ul>	Laporan Monev Pembangunan Daerah, Laporan Sinkronisasi Program RPJMD, RKPD dan RAPBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SUMBER DATA
		Persentase Capaian sasaran pembangunan daerah dengan predikat tinggi dan sangat tinggi	$\frac{\sum \text{Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi}}{\sum \text{Sasaran Pembangunan Daerah yang ada dalam RPJMD}} \times 100$	<p>Data capaian kinerja sasaran pembangunan daerah diperoleh melalui hasil pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Renja PD) dan data - data makro dari BPS Kabupaten TTU.</p> <p>Jumlah Capaian Sasaran Pembangunan Daerah merupakan Jumlah Rata - rata Sasaran Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD / RKPD</p> <p>Adapun skala penilaian atau peringkat capaian kinerja, mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:</p> <p>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>91\% \leq 100\%</math> Sangat Tinggi</li> <li>2. <math>76\% \leq 90\%</math> Tinggi</li> <li>3. <math>66\% \leq 75\%</math> Sedang</li> <li>4. <math>51\% \leq 65\%</math> Rendah</li> <li>5. <math>\leq 50\%</math> Sangat Rendah</li> </ol>	Laporan Monev / Laporan Hasil Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SUMBER DATA
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar kebijakan / perencanaan	Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	$\frac{\sum \text{Penelitian yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Penelitian dalam renja perangkat daerah}} \times 100$	Penelitian yang dimanfaatkan merupakan hasil-hasil kelitbangan sesuai Renja Perangkat Daerah tahun yang berkenan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Laporan hasil penelitian
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapelitbangda	Nilai Sakip Bapelitbangda merupakan hasil penilaian internal oleh Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Dasar penilaiannya mangacu pada Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 meliputi 4 Komponen : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja & Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kab. TTU
4	Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Indeks Kepuasan masyarakat diperoleh melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada tahun berkenan dengan mnggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert yaitu suatu skala psikometrik yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Oleh Bapelitbangda

## 2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 :

Tabel 2.3  
Rencana Kerja Tahun 2024  
Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kabupaten TTU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Skor / Nilai	20
			Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	Persentase	100%
			Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	Persentase	100%
		1.2. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	Persentase	100%
		1.3. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	Skor / Nilai	68
		1.4. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.01

## 2.3. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan komitmen kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang. Penyusunan perjanjian kinerja 2024 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada indikator kinerja dalam dokumen Renstra Bapelitbangda 2021-2026, Dokumen Renja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah T.A. 2024

Pada awal Tahun 2024 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan lembar / dokumen yang berisikan



penugasan dari Bupati kepada Kepala Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara, serta dari Kepala Bapelitbangda Kabupten Timor Tengah Utara kepada pimpinan yang lebih rendah secara berjenjang untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Bapelitbangda Kabupaten TTU  
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
-1				
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Skor / Nilai	20
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	Persentase	100%
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	Persentase	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	Persentase	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	Skor / Nilai	68

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian pelaksanaan Program & Anggaran Bapelitbangda Tahun 2024 :

Tabel 2.5  
Rincian Pelaksanaan Anggaran Bapelitbangda Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,701,317,097.00	Realisasi Minimal 90 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,264,003,104.00	Realisasi Minimal 90 %
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	299,996,560.00	Realisasi Minimal 90 %
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	179,999,576.00	Realisasi Minimal 90 %

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 25 Oktober 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan terjadi Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6  
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPELITBANGDA KAB. TTU  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Skor / Nilai	20
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	Persentase	100%
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	Persentase	100%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	Persentase	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	Skor / Nilai	68
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.01

Dengan rincian Program & Anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Rincian Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bapelitbangda Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2,832,646,416.24	Realisasi Minimal 90 %
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,189,673,104.00	Realisasi Minimal 90 %
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	358,210,973.00	Realisasi Minimal 90 %
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	194,987,688.00	Realisasi Minimal 90 %

## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

#### **3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya Untuk Meningkatkan akuntabilitas Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

### 3.1.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Capaian kinerja tahun anggaran 2024 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2024 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20	20.08	100.4	Tercapai	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dari Kementerian PAN & RB
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	100%	87.50 %	87.50	Tidak Tercapai	Laporan Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD & RKPD
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100%	65.71 %	65.71	Tidak Tercapai	Laporan Hasil Evaluasi RKPD / RPJMD
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100	Tercapai	Laporan Hasil Penelitian
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	68	N/A	N/A	N/A	LHE Internal Oleh Inspektorat.
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	86.96	107.34	Tercapai	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



Berdasarkan data yang disajikan diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut untuk mencapai Tujuan Organisasi Bapelitbangda telah menetapkan 4 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Sasaran. Adapun Sasaran kinerja yang telah tercapai sesuai target sebanyak 3 Indikator , Dua indikator tidak tercapai dan 1 indikator lainnya belum dapat diukur karena masih dalam proses Evaluasi. Untuk lebih jelasnya, capaian setiap indikator kinerja utama dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja.

Tabel 3.2

Capaian Persentase Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				
NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20	20.08	100.4

Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja merupakan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementrian PAN & RB Khususnya terhadap Komponen Perencanaan Kinerja. Berdasarkan Surat Dari Kementrian PAN & RB Nomor B/367/AA.05/2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Khususnya Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh Nilai sebesar 20.08 atau naik sebesar 2.28 Poin dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun Komponen Perencanaan Kinerja mengalami peningkatan namun Pemerintah Kabupaten TTU masih perlu memperbaiki Kualitas Perencanaan Khususnya Penetapan Indikator Kinerja Sasaran & Tujuan Organisasi agar lebih berorientasi Hasil dan memenuhi Kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bond (SMART).

2. Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD

Tabel 3.3

Capaian Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				
NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5

1	Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	100 %	87.50%	87.50
---	--	-------	--------	-------

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, di dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan sinergi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah, yaitu dokumen RPJMD, RKPD, hingga pada dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merumuskan indikator kinerja utama Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD, dengan definisi operasional yaitu konsistensi nomenklatur program pada dokumen RKPD dengan nomenklatur program pada dokumen RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan.

Konsistensi perencanaan pembangunan menjadi aspek penting agar target pembangunan jangka menengah dapat tercapai. Melalui keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan di setiap tahun berjalan, pembangunan daerah akan lebih terarah sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah.

Target indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD pada tahun 2024 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 87.50% dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Program dalam RPJMD yang dilaksanakan}}{\sum \text{Program yang ada dalam RPJMD}} \times 100 \\
&= \frac{140}{160} \times 100 = 87.50
\end{aligned}$$

Data perhitungan capaian indikator kinerja utama ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Data Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

Urusan	Perangkat Daerah	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD Yang SELARAS
Urusan pemerintahan Bid Pendidikan	Dinas Pendidikan	4	4

Urusan	Perangkat Daerah	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD Yang SELARAS
Ursan Pemerintahan Bid. Kebudayaan	Dinas Pendidikan	3	3
Urusan pemerintahan Bid Kesehatan	Dinkes & RSUD	5	4
Urusan pemerintahan Bid. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas PUPR	6	4
	Dinas PRKPP	4	3
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Sat Pol PP	3	2
	BPBD	2	2
Urisan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial	5	4
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	7	7
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas P3A	7	6
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Pangan	5	4
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	11	7
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	3
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	2	2
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Dinas Kominfo	3	3
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		1	1

Urusan	Perangkat Daerah	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD Yang SELARAS
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		1	1
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	6
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	6	5
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	3
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	2	2
Urusan Pemerintahan Bid Kearsipan		1	1
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan	4	3
Urusan Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	4
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Pertanian	5	5
	Dinas Peternakan	4	4
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian & Perdagangan	Dinas Perindustrian & Perdagangan	9	5
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	SEKRETARIAT DAERAH	3	3
	SEKRETARIAT DPRD	2	2
Urusan Perencanaan	Bapeitbangda	4	4
Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	3	3
	Badan Pendapatan Daerah	2	2
Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2	2
Pendidikan Dan Pelatihan		1	1

Urusan	Perangkat Daerah	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD Yang SELARAS
Pengelolaan Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2	2
Inspektorat	Inspektorat Daerah	3	3
Kecamatan	Kecamatan (24)	6	6
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6
JUMLAH		160	140

3. Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi.

Tabel 3.5  
Capaian Persentase Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				
NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100 %	65.71 %	65.71 %

Pembangunan daerah diukur melalui tingkat ketercapaian indikator yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan. Melalui dokumen perencanaan pembangunan, target pembangunan jangka menengah yang tertuang di dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dijabarkan ke dalam target tahunan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hasil capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah akan diukur dan dievaluasi setiap tahunnya guna memastikan target pada akhir masa periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat tercapai.



Persentase Target Indikator Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mewakili peran dalam lingkup evaluasi. Definisi operasional indikator kinerja utama ini adalah indikator kinerja Sasaran Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tercantum dalam RPJMD / RKPD yang memiliki tingkat capaian kinerja minimal 76%. Hal ini didasarkan pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017, bahwa kriteria tingkat capaian kinerja dengan kategori ‘tinggi’ adalah interval 76% sampai dengan 90%. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja dengan interval 91% - 100% masuk pada kategori “sangat tinggi”. Pengukuran capaian indikator kinerja utama ini dilaksanakan setelah evaluasi terhadap hasil Renja PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor tengah Utara sampai dengan triwulan IV atau akhir periode pelaksanaan Renja PD dengan format evaluasi seperti yang telah diatur.

Target Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi pada Tahun 2024 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 65.71 % yang diperoleh dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi}}{\sum \text{Sasaran Pembangunan Daerah yang ada dalam RPJMD}} \times 100$$

$$= \frac{23}{35} \times 100 = 65.71$$

Data perhitungan untuk mencapai indikator Kinerja Utama ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.6  
Data Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya produksi potensi Pertanian unggulan, Peternakan dan Perikanan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	40.72	40.79	100	ST
		Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	40.72	40.79	100.17	ST
2	Meningkatnya kompetensi	Kontribusi sektor industri	1.19	1.15	96.64	ST

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
	koperasi, UKM dan IKM	terhadap PDRB				
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada kawasan pantai utara	5.54	-	-	SR
		Persentasi Koperasi Aktif (%)	94.59	65.98	69.75	S
3	Meningkatnya Pemanfaatan potensi Pariwisata	Kunjungan Wisata (%)	68.00	44.46	65.38	R
4	Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor)	95.60	80.1	83.79	T
5	Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya produktifitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3.25	1.82	178.57	ST
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	78.25	75.74	96.79	ST
6	Terlaksananya peningkatan indeks kualitas tutupan lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	65.00	54.61	84.02	T
7	Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air (%)	18.00	51.11	283.94	ST
8	Terlaksananya peningkatan indeks kualitas Udara	Peningkatan Indeks Kualitas Udara (%)	53.00	94.51	178.32	ST
9	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Emisi Gas Rumah Kaca (tCO2eq)	784,037.68	N/A	0	SR
10	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	97.76	98.22	100	ST
		Angka rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.25	8.17	99.03	ST
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	68.40	71.02	100	ST
		Prevalensi Stunting (%)	14.00	25.9	54.05	R
12	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Penambahan rumah layak huni (Unit)	32,555.00	38808	100	ST
13	Meningkatnya layanan transportasi	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	38.96	38.69	99.31	ST
14	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	91.38	5.39	5.90	SR
15	Meningkatnya kapasitas jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (%)	12.95	1.03	7.95	SR
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	68.00	60,31 (B)	88.69	T
17	Meningkatnya akuntabilitas keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan (Opini)	WTP	WTP	100.00	ST
18	Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.01	83,38 (B)	100.00	ST
19	Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2.20	2.43	110.45	ST
20	6.5. Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Indeks Merit Sistem (skor)	3.00	0.27	9.00	SR
	Meningkatnya OPD yang membangun zona integritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	3.00	0	0.00	SR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
21	Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang <i>Sehat Aman Rindang dan Indah</i> (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	38.25	100.00	100.00	ST
22	Meningkatnya pengembangan kawasan pantai Utara	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB pada Kawasan Pantai Utara	20.81	20.51	98.56	ST
		Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB pada Kawasan Pantai Utara	2.79	2.39	85.66	T
		Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB pada Kawasan Pantai Utara	1.19	1.11	93.28	ST
		Kunjungan Wisata pada Kawasan Pantai Utara (%)	64.96	32.37	49.83	SR
		Cakupan pengembangan KTM Ponu (%)	70.00	65.00	92.86	ST
23	Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase Jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam Kondisi Baik (%)	87.14	45.78	52.54	SR
		Kunjungan Wisata pada Kawasan Perbatasan (%)	64.96	32.37	49.83	SR

Sumber : Laporan Evaluasi RPJMD Kab. TTU Tahun 2021-2026

#### 4. Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan.

Tabel 3.7  
Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan.

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan				
NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100.0%

Hasil penelitian menjadi salah satu bagian penting dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Bapelitbangda Kabupaten TTU adalah lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penelitian/kajian didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan perlu mendapat

dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan

Indikator Kinerja Utama Persentase Hasil Penelitian yang dimanfaatkan memiliki definisi operasional hasil/rekomendasi dari penelitian telah disampaikan kepada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan maupun Perangkat Daerah lain yang terkait untuk selanjutnya ditindaklanjuti berupa kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan.

Perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Penelitian yang ditindaklanjuti / dimanfaatkan}}{\sum \text{Penelitian dalam Renja Perangkat Daerah}} \times 100 \\ & = \frac{1}{1} \times 100 = 100 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2024, Bapelitbangda Kabupaten TTU telah melaksanakan satu judul penelitian/kajian yaitu ***“Penelitian Berbasis Teknologi Pemupukan dan Organik terhadap Tanaman Kacang Merah Lokal Eban”*** adapun hasil penelitian tersebut telah diseminarkan dan rekomendasi-rekomendasi hasil penelitian tersebut telah dikirimkan ke Perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti.

## 5. Nilai SAKIP Bapelitbangda

Tabel 3.8  
Capaian Nilai SAKIP Bapelitbangda.

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda				
NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai SAKIP Bapelitbangda	80	N/A	N/A

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja

#### 4. Evaluasi akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Aksi, Pohon Kinerja / Cascading dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kab. TTU melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Adapun Nilai SAKIP Bapelitbangda Kab. TTU tahun 2024 belum diperoleh karena masih dalam tahap Evaluasi oleh TIM SAKIP Kab. Timor Tengah Utara.

#### 6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.9  
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS				
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda				
NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	86.96	107.34

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Bapelitbangda Kab. TTU dalam hal ini adalah perangkat daerah lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 – 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapelitbangda Kab. TTU dihitung setiap semester secara manual menggunakan Kertas kerja Excel. Sesuai pengukuran pada Kertas Kerja tersebut realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappedalitbangda Kab. TTU tahun 2024 adalah sebesar 86,96 yang merupakan akumulasi rata-rata hasil IKM semester satu dan dua dengan jumlah responden sebanyak 90 orang. Target IKM Tahun 2024 sebesar 81,01 sehingga capaiannya sebesar 107,34 % dan telah melebihi target. Nilai tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total Nilai Perepsi Perunsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dari nilai IKM tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai IKM Bapelitbangda masuk dalam kategori mutu pelayanan “B” , hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Bapelitbangda Kab. TTU Tahun 2024 secara umum telah baik dan penerima layanan merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

### 3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Perbandingan capain kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 dan 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	--	--	--	--	--	--	20	20.08	100%
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	100%	95.54	95.54	100%	96.88%	96.88%	100%	87.50%	87.50%



N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	--	--	--	--	--	--	100%	65.71%	65.71%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	56.00	56.10	100.18	62	69	111	68	N/A	N/A
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.87	85.10	106.55	80.44	86.74	108	81.01	86.96	107.34

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Bapelitbangda mengalami Fluktuasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terdapat trend realisasi tetap maupun menurun baik di tingkat Realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya. Adapun capaian kinerja tetap baik di tingkat Realisasi maupun capaian kinerja terdapat pada indikator Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan hal ini disebabkan karena realisasi kinerja indikator tersebut telah terpenuhi 100 persen, selain itu juga terdapat dua indikator sasaran yang mengalami trend penurunan di tingkat capaian kinerja yaitu Indikator Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD yang digunakan untuk mengukur tingkat Konsistensi dimana pada tahun 2023 sempat mengalami kenaikan baik di tingkat realisasi maupun capaian kinerjanya namun pada tahun 2024 baik tingkat Capaian maupun realisasi pada indikator ini mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya, selain itu trend penurunan capaian kinerja juga terjadi pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat meskipun Tingkat realisasi meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 namun tingkat capaian kinerjanya menurun di tahun 2024.

Selain indikator kinerja yang mengalami trend penurunan maupun tetap juga terdapat beberapa indikator yang tidak & belum dapat diperbandingkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator yang Tidak Dapat diperbandingkan meliputi Indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan & Persentase Capaian sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi & Sangat Tinggi, indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena Merupakan Indikator Baru hasil Tindak Lanjut evaluasi AKIP.
2. Indikator yang belum dapat diukur yaitu Indikator Nilai SAKIP Bapelitbangda karena masih dalam Proses Evaluasi oleh Tim AKIP Kabupaten.

### 3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026.

Berikut disampaikan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Renstra Tahun 2021-2026 pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11  
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra Bapelitbangda Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20.08	22	91.27
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	87.50%	100%	87.50
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	65.71%	100%	65.71
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100.00

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6 = 4/5*100
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	N/A	80	--
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.96	82.15	105.86

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

Untuk Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur dengan Indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD dan Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi masing – masing belum mencapai target akhir renstra dengan nilai capaian masing – masing sebesar 91,27 Untuk Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja , 87.50 % untuk indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD dan 65.71 % untuk Indikator Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat.

Untuk sasaran strategis 2 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan dengan Indikator Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan telah mencapai target renstra dengan Tingkat Kemajuan sebesar 100 %.

Untuk sasaran strategis 3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda belum dapat diukur tingkat kemajuannya teradap target jangka menengah Renstra Bapelitbangda 2021-2026 karena sementara dalam Proses Evaluasi oleh Tim AKIP Kabupaten.

Untuk Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target akhir Renstra dengan TK. Kemajuan sebesar 105.86 % dan diharapkan target ini terus terjaga hingga akhir periode Renstra dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Layanan Publik.

### 3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi /Kabupaten / Kota Lain.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi /Kabupaten / Kota Lain dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL /	STANDAR DAERAH LAIN	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20.08	-	25 (Standar BP4D Kab Belu)	80.32
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	87.50%	-	100 % (Standar Bapperida Propinsi)	87.50
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	N/A	-	-	-
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	-	-	-
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	N/A	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.96	-		-

Dari tabel 3.12 tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja atas indikator sasaran Bapeitbangda tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional terkait indikator-indikator tersebut. Dalam hal perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, kami mencoba membandingkan dengan standar Perangkat Daerah dengan nomenklatur yang sama pada tingkat Kabupaten dan Kota lain yang memiliki indikator sejenis. Adapun standar daerah lain tersebut adalah dari BP4D Kabupaten Belu, Khususnya Komponen indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan kinerja dan Bapperida

Provinsi NTT khususnya indikator Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD dimana dari data diatas dapat diketahui bahwa Baik BP4D Kabupaten Belu maupun Bapperida Provinsi NTT memiliki Standar yang lebih tinggi dari realisasi Kinerja Bapelitbangda Kab. TTU. Adapun komponen indikator lainnya tidak dapat diukur karena masing- masing daerah memiliki standar yang berbeda-beda.

### 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13  
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi yang Telah dan Akan dilakukan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan / Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20	20.08	100.40	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 telah melampaui target, yaitu sebesar 20.08 Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik dari seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk membenahi Dokumen Perencanaan Kinerja khususnya memperbaiki Rumusan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator kinerja agar memenuhi Kriteria SMART & Berorientasi hasil. Selain itu, sebagian besar rekomendasi Tim Evaluator atas data dukung SAKIP telah dipenuhi dan ditindaklanjuti.	Untuk memenuhi target indikator Skor Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Bapelitbangda sebagai salah satu Perangkat Daerah Pengampu SAKIP telah melakukan perbaikan atas manajemen kinerja dengan menindaklanjuti catatan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP salah satunya dengan cara merevisi IKU dan Menyusun Pohon kinerja sehingga dapat terlihat logical framework mulai dari kinerja Tk. Pemerintah Kabupaten TTU hingga Perangkat Daerah.  Adapun Upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja



NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan / Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
							adalah dengan cara melakukan pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA) kepada Perangkat Daerah Khususnya dalam hal merumuskan Tujuan, Sasaran beserta indikator kinerja yang tepat dan berorientasi hasil.
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	100%	87.50%	87.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator kinerja Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD belum mencapai target hal ini disebabkan karena Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan perubahan nomenklatur Program / Kegiatan maupun Indikator Kinerja yang berdampak pada capaian kinerja, Selain itu Kurangnya Fiskal Daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa Program dalam RPJMD tidak dapat dilaksanakan.</li> </ul>	<p>Untuk memenuhi target Indikator ini Bapelitbangda telah melaksanakan Pendampingan dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RENJA-PD) khususnya dalam hal penetapan Program &amp; Indikator Kinerja selain itu Bapelitbangda juga telah berupaya mengoptimalkan Koordinasi antar OPD dan Stakeholder untuk mengawal program – program Prioritas.</p> <p>Adapun upaya yang akan dilakukan di tahun 2025 untuk mencapai target kinerja ini adalah : Melakukan revisi terhadap Dokumen Perencanaan Daerah maupun Perangkat Daerah jika terjadi perubahan regulasi yang berdampak pada pencapaian kinerja.</p>

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan / Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100%	65.71%	65.71%	<p>Indikator kinerja Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi belum mencapai target. Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi berkala yang dilaksanakan masih berfokus pada realisasi kegiatan/Output dan penyerapan anggaran dibandingkan Realisasi Kinerja Utama/Outcome.</li> <li>• Keterbatasan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait, khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi sumber data belum merilis data terbaru.</li> <li>• Data / Informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait instrument / komponen yang dipergunakan untuk melakukan survei / perhitungan indikator daerah kurang lengkap sehingga Pemerintah Daerah kesulitan melakukan intervensi.</li> </ul>	<p>Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan koordinasi dan asistensi / Evaluasi Kinerja secara Berkala kepada seluruh Perangkat Daerah</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang menjadi sumber data seperti BPS untuk mendapatkan informasi terupdate khususnya terkait realisasi komponen indikator makro.</li> </ul> <p>Selain hal yang telah dilaksanakan diatas untuk mencapai target kinerja ini bapelitbangda juga telah merencanakan beberapa hal yang akan dilaksanakan di tahun 2025 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja tidak hanya akan berfokus pada pencapaian output dan penyerapan anggaran tetapi akan diarahkan untuk pencapaian kinerja utama Perangkat daerah</li> <li>• Memperkuat komitmen</li> </ul>

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan / Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
							Perangkat Daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberhasilan pemenuhan target indikator kinerja ini dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh target kegiatan penelitian / kajian dapat terselesaikan dengan baik, Selain itu, koordinasi dengan perangkat daerah lain juga menjadi penentu apakah kegiatan penelitian/kajian yang dilakukan telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.</li> </ul>	<p>Upaya yang telah dilakukan Bapelitbangda untuk mencapai atau meningkatkan target kinerja ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan penelitian/kajian yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.</li> <li>Menjalin Kerja Sama dengan beberapa Lembaga Penelitian</li> </ul> <p>Selain Upaya yang telah dilaksanakan diatas Bapelitbangda juga telah merencanakan untuk mengajukan kebutuhan ASN khususnya Fungsional Peneliti kepada BKDPSDM untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Bapelitbangda.</p>
1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	68	N/A	N/A	Nilai SAKIP Bapelitbangda pada dua tahun terakhir selalu menunjukkan Peningkatan yang baik hal ini tidak terlepas dari komitmen Bapelitbangda untuk selalu meningkatkan / memperbaiki	<p>Untuk mencapai target NILAI SAKIP Bapelitbangda telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengukuran dan penilaian kinerja secara</li> </ul>

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan / Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
						<p>manajemen kinerja salah satunya adalah dengan cara menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya agar dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi. Adapun kendala yang dihadapi Bapelitbangda terkait indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2024 adalah Penilaian Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah seringkali terlambat sehingga pada saat penyusunan laporan ini Bapelitbangda Belum dapat mendeskripsikan kelemahan-kelemahan Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024.</p>	<p>berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil penilaian AKIP tahun sebelumnya .</li> </ul> <p>Selain solusi yang telah dilakukan diatas untuk meningkatkan nilai SAKIP di tahun mendatang maka Bapelitbangda akan melakukan penilaian kinerja secara berkala tidak hanya pada tingkat kinerja organisasi tetapi juga di tingkat individu.</p>
1.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	86.96	107.34	<p>Capaian kinerja sasaran ini telah melampaui target sehingga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bapelitbangda telah dinilai baik dan mampu memberikan kepuasan terhadap penerima layanan. Adapun keberhasilan sasaran kinerja ini tidak terlepas dari Adanya komitmen dari Pimpinan dan seluruh jajaran Bapelitbangda untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dengan cara meningkatkan Kapasitas dan</p>	<p>Upaya yang telah dan akan dilakukan Bapelitbangda dalam meningkatkan kualitas layanan publik yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan semua rekomendasi dan rencana tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan.</li> <li>Melakukan revidi terhadap kebijakan Standar Pelayanan yang ada di Bapelitbangda.</li> </ul>

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Telah dan Akan Dilakukan / Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8
						kualitas SDM petugas pelayanan, penyederhanaan proses dan prosedur pelayanan serta kemudahan dalam mengakses pelayanan	

### 3.1.6. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari indikator kinerja pada PK Bapelitbangda tahun 2024 diperoleh penyerapan anggaran sebesar 87.84% dengan capaian tiga indikator telah memenuhi target, dua Indikator belum terukur dan satu Indikator belum mencapai target. Adapun untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing sasaran strategis digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = 1 - \left( \frac{\text{Real Anggaran} : \text{Real Outcome}}{\text{Pagu Anggaran} : \text{Target Outcome}} \right) \times 100$$

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.14  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan & Sasaran

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1.1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	20	20.08	100.40	1,096,673,210.00	1,080,535,749.00	98.53	1.8640
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	100%	87.50%	87.50	221,212,527.00	216,761,554.00	97.99	-
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	100%	65.71%	65.71%	229,998,340.00	218,509,760.00	95.00	-
1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100	194,987,688.00	188,904,310.00	96.88	3.1199
1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda	Nilai SAKIP Bapelitbangda	68	N/A	N/A	2,375,029,689.24	1,864,339,089.00	78.50	-
1.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	86.96	107.34	457,616,727.00	449,985,903.00	98.33	8.3956

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas diketahui bahwa terdapat tiga indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi karena memiliki rata-rata capaian kinerja melebihi rata-rata capaian realisasi anggaran atau capaian kinerjanya  $\geq 100\%$  indikator sasaran strategis dimaksud adalah Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja, Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan dan Indeks Kepuasan Masyarakat, sedangkan tiga indikator lainnya masih kurang efisien.

### 3.1.7. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran Bapelitbangda Kab. TTU tahun 2024, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15  
Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	100.40	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sesuai Ketentuan	100%	Menunjang
				<i>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</i>	<i>Persentase Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan &amp; Pendanaan</i>	100%	Menunjang
				Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas Sektor	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase Terinputnya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	100%	Menunjang
				Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Menunjang
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi	N/A	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	100%	Menunjang
				Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100%	Menunjang
		Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD	87.50	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mitra Bidang P2M, Ekonomi & SDA, Infrastruktur & Kewilayah)	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				<i>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</i>	<i>Perentase Penyusunan dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang disusun sesuai ketentuan</i>	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%	Menunjang
				<i>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA</i>	<i>Persentase terlaksanannya koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring &amp; Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Ekonomi &amp; SDA</i>	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil monev perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	100%	Menunjang
				<i>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</i>	<i>Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan, Monitoring &amp; Evaluasi Perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur &amp; Kewilayahan</i>	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		Menunjang



NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah Bidang kewilayahan	100%	Menunjang
1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan	Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan	100.00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Hasil penelitian &amp; Pengembangan Bid Ekonomi &amp; Pembangunan yang tersusun</i>	100%	Menunjang
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	100%	Menunjang
				<i>PENGEMBANGAN INOVASI &amp; TEKNOLOGI</i>	<i>Persentase Capaian Kegiatan Inovasi &amp; teknologi</i>	100%	Menunjang
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100%	Menunjang
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
		Nilai SAKIP Bapelitbangda	N/A		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan	100%	Menunjang
				<i>PERENCANAAN, PENGANGGARAN &amp; EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</i>	<i>Persentase Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran &amp; Evaluasi Kinerja</i>	100%	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				<i>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</i>	<i>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	Menunjang
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	Menunjang
1.4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat	107.34	<i>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</i>	<i>Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				<i>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>	<i>Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak menunjang
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Cakupan Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100%	Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	100%	Menunjang

Dari tabel 3.15 tersebut diatas diketahui bahwa Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan 4 Program, 13 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dan seluruhnya telah mendukung atau menunjang pencapaian kinerja organisasi, dalam hal ini adalah tujuan dan sasaran Organisasi.

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.16  
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2,832,646,416.24</b>	<b>2,314,324,992.00</b>	<b>81.70</b>
1.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN & EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21,000,000.00	20,750,000.00	98.81
1.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,000,000.00	20,750,000.00	98.81
1.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,354,029,689.24	1,843,589,089.00	78.32
1.2.1	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	2,283,429,738.24	1,773,670,089.00	77.68
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70,599,951.00	69,919,000.00	99.04
1.3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
1.3.1	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
1.4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	266,621,577.00	263,931,119.00	98.99
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1,999,630.00	1,985,000.00	99.27
1.4.2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	45,128,775.00	43,399,000.00	96.17
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69,999,302.00	69,959,249.00	99.94
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,999,870.00	9,999,870.00	100.00
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,494,000.00	138,588,000.00	99.35
1.5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48,241,805.00	45,690,450.00	94.71
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	993,905.00	990,000.00	99.61



NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air & Listrik	43,277,900.00	40,730,450.00	94.11
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	3,970,000.00	3,970,000.00	100.00
1.6	<i>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</i>	132,753,345.00	130,364,334.00	98.20
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108,327,659.00	106,364,334.00	98.19
1.6.2	<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya</i>	21,985,686.00	21,570,000.00	98.11
1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	2,440,000.00	2,430,000.00	99.59
2	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1,189,673,104.00	1,162,534,749.00	97.72
2.1	<i>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</i>	1,064,723,502.00	1,049,262,749.00	98.55
2.1.1.	Kordinasi Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas Sektor	20,299,874.00	20,299,150.00	100.00
2.1.2.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	84,499,690.00	84,375,599.00	99.85
2.1.3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota	959,923,938.00	944,588,000.00	98.40
2.2.	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	31,949,708.00	31,273,000.00	97.88
2.2.1	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah	31,949,708.00	31,273,000.00	97.88

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
2.3	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	92,999,894.00	81,999,000.00	88.17
2.3.1	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	92,999,894.00	81,999,000.00	88.17
3	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>358,210,973.00</b>	<b>353,272,314.00</b>	98.62
3.1	<i>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</i>	158,212,785.00	155,171,760.00	98.08
3.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, RKPD)	24,999,744.00	24,079,000.00	96.32
3.1.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	24,999,744.00	23,459,000.00	93.84
3.1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	36,999,090.00	36,964,760.00	99.91
3.1.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	71,214,207.00	70,669,000.00	99.23
3.2	<i>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA</i>	99,999,124.00	98,744,474.00	98.75
3.2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	24,999,710.00	24,782,474.00	99.13
3.2.2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	24,999,852.00	24,924,000.00	99.70

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
3.2.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	24,999,710.00	24,039,000.00	96.16
3.2.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	24,999,852.00	24,999,000.00	100.00
3.3.	<i>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</i>	<i>99,999,064.00</i>	<i>99,356,080.00</i>	<i>99.36</i>
3.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24,999,702.00	24,834,000.00	99.34
3.3.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	24,999,922.00	24,824,000.00	99.30
3.3.3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24,999,710.00	24,899,080.00	99.60
3.3.4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	24,999,730.00	24,799,000.00	99.20
4	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>194,987,688.00</b>	<b>188,904,310.00</b>	96.88
4.1.	<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN</i>	<i>156,427,994.00</i>	<i>151,379,310.00</i>	<i>96.77</i>
4.1.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan & Pangan	156,427,994.00	151,379,310.00	96.77
4.2	<i>PENGEMBANGAN INOVASI &amp; TEKNOLOGI</i>	<i>38,559,694.00</i>	<i>37,525,000.00</i>	<i>97.32</i>
4.2.1	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	38,559,694.00	37,525,000.00	97.32

## **BAB. IV PENUTUP**

### **4.1. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKJIP ini merupakan salah satu langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

LKJIP Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan / sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan & Capaian Kinerja Pembangunan Daerah terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu : Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja dengan Capaian Kinerja sebesar 100.4%, Persentase Program RKPD Selaras dengan RPJMD dengan capaian kinerja sebesar 87.50%, dan Indikator Kinerja Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Daerah dengan Predikat Tinggi dan Sangat Tinggi sebesar 65.71%;
- Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Dasar Kebijakan / Perencanaan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Hasil Penelitian yang Dimanfaatkan dengan capaian kinerja sebesar 100 %;
- Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapelitbangda belum dapat diukur capaian kinerjanya karena masih dalam Tahap Evaluasi.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Bapelitbangda terdiri dari satu indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat

dengan capaian kinerja sebesar 107.34%

Untuk mencapai target – target dalam sasaran strategis tentunya tidak terlepas dari sumber daya keuangan. Adapun anggaran yang disediakan untuk mencapai target kinerja Bapelitbangda pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.575.518.181.24 dan telah terrealisasi sebesar Rp. 4.019.036.365, dengan tingkat capaian sebesar 87.84 %. Selain Sumber Daya Keuangan untuk mencapai sasaran strategis yang ada Bapelitbangda juga perlu memperhatikan catatan- catatan hasil evaluasi sebelumnya.

#### 4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan kinerja Bapelitbangda Kab. TTU dimasa yang akan datang adalah :

- Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran yang menganut “ e-performance based budgeting” agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan fasilitasi dengan pemangku kepentingan beserta seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan
- Mengoptimalkan Sumber Daya aparatur yang dimiliki oleh Bapelitbangda Kab. TTU untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok & fungsi

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian & Pengembangan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024. Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bapelitbangda Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Kefamenanu, 26 Februari 2025  
KEPALA BAPELITBANGDA KAB. TTU, 1

  
SALVATORE G.A.M. LAKE, SE  
NIP. 19720818 200003 1009